

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO MANGGARAI BARAT YANG DIKECUALIKAN

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data Pribadi ASN	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	1 Mengungkap data pribadi yang merupakan ranah privasi 2 Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya
2	Dokumen dan proses usulan mutasi/pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/fungsional	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Sampai dengan Pelantikan/Mutasi	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja
3	Dokumen proses ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS c. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juklak PP Nomor 53 Tahun 2010	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
4	Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia - Timbulnya penyimpangan	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
		d. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara			
5	Data Wajib Pajak Daerah	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Bab 14 Pasal 172 c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Selama Perda belum dicabut	Dikawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan wajib pajak
6	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Sampai penetapan pemenang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif	Efisien anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
7	SPJ dan Bukti-bukti Pengeluaran	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan	Terbatas sampai setelah audit APIP/BPK	Dikawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
		c. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			
8	1 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 3 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	a. Pasal 6 ayat 3 huruf d. jo pasal 17 huruf I UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/004/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah e. Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
9	Data SP2D Pihak ke-3	a. Undang-Undang Nomlor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara Pasal 31	Permanen	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan Usaha

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 Ayat 2 c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 3 d. Permendagri 13 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah			
10	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	a. Undang-Undang Nomlor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara Pasal 31 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 d. Permendagri 13 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK	a. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Kelancaran proses pemeriksaan

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
11	Proses Evaluasi pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf b b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3	Permanen	Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggungjawabkan	Perlindungan usaha
12	Rincian informasi terkait nomor rekening perusahaan dan rincian HPS dalam dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3	Sampai dengan penandatanganan perjanjian kontrak sampai dengan penyerahan berkas	a. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik	Perlindungan Usaha
13	Dokumen penawaran pengadaan barang jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf b b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama	Melindungi hak dan kekayaan intelektual	Perlindungan Usaha
14	Data user dan password administrator website/kode akses elektronik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j	Selama sistem digunakan	1 Keamanan data terancam	Melindungi keamanan sistem

NO	URAIAN INFORMASI		DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKWENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
			b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		2 Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	
15	Security Network		a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	1 Keamanan data terancam 2 Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi keamanan sistem
16	Lokasi Server		a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pncurian data	Melindungi keamanan sistem
17	Internet Protocol/IP Adres Private beserta topologi jaringan		a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Mengakibatkan penerobosan/penyalahguanaan akses	Melindungi keamanan sistem
18	Konfigurasi dan aplikasi beserta <i>username</i> dan <i>password</i>		a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j	Selama sistem digunakan	Mengakibatkan penerobosan/penyalahguanaan akses	Melindungi keamanan sistem

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
		b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
19	Manajemen Bandwith	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j	Selama sistem digunakan	Mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith di luar ketentuan	Melindungi keamanan sistem
		b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
20	Setting dan Konfigurasi jaringan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Semua berita masih bersifat rahasia	Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
21	Berita Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c;	Semua berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
22	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c;	Selama pengungkapannya membahayakan akan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
23	Perangkat khusus persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c;	Selama pengungkapannya membahayakan akan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
24	Kuci Sistem Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c;	Selama pengungkapannya membahayakan akan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
25	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c;	Selama pengungkapannya membahayakan akan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
26	Frekwensi Radio Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c;	Selama pengungkapannya membahayakan akan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
27	Berita/Radiogram Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c;	Selama pengungkapannya membahayakan akan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
28	Sistem Keamanan Informasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf b, l, dan j; b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
29	Dokumen implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf b, l, dan j;	Selama berlaku	Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKWENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
		b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
30	Data Pengaduan masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf j	Permanen	Keamanan Informasi pribadi terancam	Melindungi privasi pelapor